

# Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020)

Syeni Rakhmadani <sup>a1,\*</sup>, Joko Mulyono <sup>b 2</sup>

<sup>1,2</sup> STISIPOL Dharma Wacana, Metro, Lampung, Indonesia

<sup>1</sup> syeni.rakhmadani@gmail.com\*; <sup>2</sup> jokomulyono070269@gmail.com

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received 2020-11-06

Revised 2021-02-06

Accepted 2021-06-30

### Keywords

Implementation; Corporate Social Responsibility Program;  
Community development

## ABSTRACT

*Symptoms of increasing poverty are in line with the multidimensional crisis that occurred in Indonesia. One of the efforts to reduce the poverty rate that can continue to increase is by empowering the community. Community empowerment is one alternative in alleviating poverty. The purpose of this research is that the private sector or company has an obligation to contribute to the environment through the Corporate Social Responsibility Program. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data with data analysis techniques proposed by Miles and Hubberman, namely by data reduction, data analysis and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Corporate Social Responsibility Program in Increasing Community Empowerment at PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Metro Branch Office shows that it has had basic steps and clear policy objectives as outlined in the decision of the board of directors No: 153. X/2018 concerning the Management of the Social and Environmental Insurance Fund of PT BPD Lampung, has the main policy source in the form of funds originating from net profit in 2019 with a percentage of 3.1% and 59.5% of funds for community empowerment programs. Communication between organizations has been carried out clearly and consistently. Characteristics The Implementing Body has a clear structure, attitude and tendency for implementers who are very responsive and understand program implementation as well as a very supportive economic and social environment.*

## PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik pada September 2019 menunjukkan presentase kemiskinan yang terjadi di Indonesia mencapai 9,22% atau sekitar 24,79 juta masyarakat Indonesia mengalami kemiskinan. Angka statistik ini seakan menunjukkan suatu gejala kemiskinan yang dirasakan masyarakat Indonesia seperti busung lapar, rendahnya daya beli masyarakat dalam menghadapi harga – harga kebutuhan pokok hingga susahny mencari pekerjaan dan uang. Problem kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus dan dicarikan solusinya. Gejala kemiskinan semakin meningkat sejalan dengan terjadinya krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia.

Salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan yang bisa terus bertambah adalah dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu alternatif dalam menekan kemiskinan. Dalam Program Pemberdayaan diperlukan kerjasama dari semua stakeholder dari pemerintah, swasta dan lembaga lain. Keberadaan sektor swasta dalam hal ini perusahaan sebagai pelaku bisnis memang telah banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang kebutuhan masyarakat, membayar pajak memberikan sumbangan dll. Namun disisi lain masih banyak menimbulkan persoalan seperti eksploitasi sumber daya manusia yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban dari perusahaan kepada karyawan,



eksploitasi alam besar –besaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga berdampak munculkan kerusakan lingkungan,

Seperti contoh permasalahan yang muncul dari aktivitas industry seperti kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur. Dikutip dari laman cnn Indonesia menyebutkan sebanyak 4 desa dilahan 400 hektar terdampak langsung dari semburan lumpur panas itu sehingga berbagai persoalan muncul dalam persoalan ini banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mata pencarian dan sumber sumber pendapatan lainnya. Dari kasus ini bawasanya perlu di jadikan cermin bawasanya perlu adanya sebuah komitmen dan kewajiban dari perusahaan. Memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap lingkungan Melalui Program *Corporate Social Responsibility* salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). CSR merupakan suatu kewajiban perusahaan yang bertanggungjawab bukan hanya untuk konsumen, pemegang saham ataupun karyawan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai salah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah kini pun wajib melakukan CSR kepada lingkungan sekitar. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Pasal 106 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih; dan (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Lahirnya peraturan ini merupakan dasar kebijakan kewajiban bagi BUMD yang di daerah untuk dapat melaksanakan menyisihkan sebagian dari laba bersih yang diperoleh yang prioritas penyalurannya diperuntukan guna memberdayakan masyarakat dengan melakukan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut Situmeang (2016:96) Tujuan utama dari Program *Corporate Social Responsibility* adalah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat lokal. pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk menjadi makin mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka. Dalam hal ini, proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecendrungan yaitu sebagai kecendrungan primer dari pemberdayaan dalam proses pemberian dan pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan kecendrungan dalam prosen menstimulasi, mendorong ataupun memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang terjadi pilihan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan berbagai usaha pemberdayaan karena pada dasarnya kesejahteraan dapat di raih apabila masyarakat yang ada memiliki tingkat kemandirian dan motivasi yang tinggi. Tujuan yang akan dicapai dari usaha pemberdayaan masyarakat ini pun adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya dan mampu mengadopsi inovasi sehingga mereka dapat mampu dengan mandiri meningkat kesejahteraannya.

PT Bank Lampung Kantor Cabang Metro yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang di miliki oleh Pemerintah Kota Metro dan terletak di kawasan Kota Metro mempunyai kewajiban turut andil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kota Metro. Sebagai bentuk nyata pertanggung jawaban sosial kepada masyarakat di tahun 2020 ini, PT Bank Lampung Cabang Metro telah menyalurkan bantuannya CSRnya kepada masyarakat Kota Metro dengan berbagai peruntukan. Hal ini terlihat pada Table 1. Alokasi Penyaluran Bantuan *Coorporate Sosial Responsibility* PT Bank Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020 :

**Tabel 1** : Alokasi Penyaluran Dana Program *Corporate Social Responsibility* PT Bank Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020.

No	Program	Penerima	Jenis Pemberian	Besaran
1	Peningkatan Mutu Pendidikan	TK Khodojah	Pengadaan Meublier	25.000.000
2	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Kube E-Warung Bina Makmur	Pembangunan Ruangan	12.808.000
		Kube E-Warung Drupradi	Pembangunan Ruangan dan Meublier	18.990.000
		Kube E- Warung Sentosan	Pembangunan Ruangan dan Meublier	19.945.000
		Kelompok Tani Mandiri Jasa Bersama	Pengadaan Mesin Pencacah Rumput dan Pengiling Kotoran	15.000.000
		Wulandari Handmade	Pengadaan Mesin Jahit	20.740.000
		Rumah Tapis Dewi Satika	Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras	22.000.000
3	Peningkatan Pelastarian Lingkungan Hidup	Kelompok Bank Sampah	Pengadaan Bentor	27.000.000
4	Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengadaan Bangku Taman Sebanyak 8 Unit dan Pengadaann Tempat Sampah 4 Unit	23.000.000
JUMLAH				184.483.000

Sumber data : PT Bank Lampung Tahun 2020

Data diatas menunjukkan bahwa PT Bank Lampung Kantor Cabang Metro telah menyalurkan bantuan Program *Corporate Social Responsibility* keberbagai aspek dengan alokasi mulai dari pembangunan infrastuktur sebesar Rp. 23.000.000 atau sekitar 12%, pendidikan sebesar Rp.25.000.000 atau sekitar 13.5%, Pelestarian lingkungan sebesar Rp. 27.000.000 atau sekitar 14.5% dan sebagaian besar alokasi diperuntukan untuk ekonomi kerakyatan dengan menyalurkannya kepada kelompok usaha kecil menengah berupa penambahan modal dengan jumlah mencapai Rp. 109.340.000 atau sekitar 59,5% dari jumlah dana yang disalurkan. Dari beberapa alokasi yang diteladkan di berikan, terlihat lebih banyak dana yang dialokasikan untuk memperdayakan masyarakat sehingga hal ini menjadi perhatian untuk dilakukan sebuah kajian.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program *Corporate Social Responsibility* yang telah dijalankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan

Menurut Hanifah Harsono (Harsono, 2002:67), Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Wijaya dan Suparno

(Pasalong: 2016:57), implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. dalam hal ini, banyak orang yang beranggapan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, seolah – oleh tahap implementasi ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, pada kenyataannya dapat dilihat bahwa seberapa baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya bila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar (Dewi, 2017).

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks. . Model-model tersebut antara lain :

1. Model Teori Implementasi A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang di perkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2010: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi sesuatu keberhasilan implementasi, yaitu: (1) Karakteristik Masalah; (2) Karakteristik Program/Kebijakan; (3) Variable Lingkungan.

2. Model Teori Implementasi menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini sering disebut sebagai Model Implementasi Kebijaksanaan. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (*Performance*). Kedua ahli tersebut mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan prestasi kerja dipisahkan oleh jumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan dalam Hiplinudin (2016:42-43). Variabel-variabel tersebut adalah: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Sumber-sumber kebijakan; (3) Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana; (4) Karakteristik agen pelaksana; (5) Sikap atau Kecendrungan (Disposisi) Para Pelaksana dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

3. Model Teori Implementasi Edward III

Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* (administrasi publik) dan *public policy* (kebijakan publik). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

### ***Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep yang semakin populer dibicarakan namun belum memiliki kesamaan definisi meskipun memiliki esensi yang sama. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Wibisono 2007:7) mendefinisikan CSR sebagai : “*Continuing commitment by business to behave atchically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local comunitte and society at large*”

Situmeang (2016: 9), CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Pendapat lain Suharto (2009:105) mengemukakan pendapatnya mengenai CSR. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian dari keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan Lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan professional.

Ranah *Corporate Social Responsibility* memiliki dimensi yang sangatlah luas serta kompleks serta CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda. Karena itu, untuk memudahkan memahaminya. Banyak para ahli mencoba mengarisbawahi prinsip – prinsip yang terkandung dalam

CSR . Crowther David (2008 : 201) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, antara lain yaitu: (1) *Sustainability*; (2) *Acontability* dan (3) *Transparancy*.

Situmeang (2016:12) menyebutkan ada dua indikator yang dapat mengukur keberhasilan dari program CSR, yaitu : (1) Indikator keberhasilan internal, yaitu : (a) Kebijakan perusahaan tentang *Community Depelopment*; (b) Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi; (c) Program *Community Development* dan alokasi biaya; dan (d) Kinerja atau output yang dihasilkan program (2) Indikator keberhasilan eksternal, yaitu : (a) Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana, implementasi hingga monitoring dan evaluasi; (b) Tingkat kemandirian masyarakat dan (c) Keberlanjutan.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Ife (Situmeang, 2016:85), Pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti membantu komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk menentukan masa depan warga komunitas. Prijno dan Prannarka (Situmeang, 2016 : 88) pemberdayaan masyarakat merupakan bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Situmeang (2016:88), pemberdayaan masyarakat adalah proses dimana khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan di dorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri.

Lebih lanjut menurut badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (Tampubolon, 2006) mengemukakan proses – proses dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : (1) *Getting to know the local community*, mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan lainnya.; (2) *Gathering knowledge about the local community*, Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat.; (3) *Identifying the local leaders*, Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh masyarakat setempat; (4) *Stimulating the community to realize that it has problems*, Di dalam masyarakat yang terikat dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan.; (5) *Helping people to discuss their problem*, Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan; (6) *Helping people to identify their most pressing problems*, Masyarakat dibimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar. (7) *Fostering self-confidence*, Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. (8) *Deciding on a program action*, Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. (9) *Recognition of strengths and resources*, Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengkaji lingkungan internal dan eksternal.(10) *Helping people to continue to work on solving their problems*, Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk merubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, (11) *Increasing people's ability for self-help*, Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Secara garis besar penelitian ini lebih berorientasi pada upaya

untuk mengetahui bagaimana implementasi program *corporate social responsibility* dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Perdayakan Masyarakat yang berjalan di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020 penulis menggunakan model implementasi yang di kembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa ada enam dimensi penting yang perlu diperhatikan untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan. 6 dimensi tersebut meliputi :

### 1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Untuk menjalankan kebijakan dengan baik sebuah kebijakan haruslah mempunyai ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang jelas. Sebuah kebijakan yang tidak memiliki ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang jelas akan mudah terjadi penyimpangan dari para pelaksana kebijakan. Dalam implementasi Program CSR di PT Bank Pembangunan Daerah Lampung kantor Cabang Metro memiliki ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang jelas. Hal tersebut juga diperkuat dari data yang didapat penulis dilapangan dengan diterbitkannya keputusan direksi No : 153.KEP/DIR/KOM/X/2018 tentang Pengelolaan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *Corporate Social Responsibility* PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai ukuran dasar kebijakannya. Sedangkan untuk tujuan kebijakannya pun tertuang di keputusan direksi tersebut No : 153.KEP/DIR/KOM/X/2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *Corporate Social Responsibility* PT Bank Pembangunan Daerah Lampung pada BAB I Pendahuluan point B yaitu : (1) Memberikan dampak sosial yang positif (sesuai dan bermanfaat) untuk masyarakat dan lingkungannya (2) Meningkatkan produktifitas oprasi dan unit usaha; (3) Mendukung secara maksimal upaya meningkatkan citra dan reputasi bank dimata stakeholder dan (4) memberikan *add value* untuk *stakeholder*.

Winarno (2012:160) menyebutkan dalam melakukan implementasi tujuan dan sasaran suatu program yang akan diimplementasikan harus di identifikasikan dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuannya – tujuannya tidak dipertimbangkan. Lahirnya kebijakan direksi tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan program Implementasi *Program Corporate Social Responsibility* pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro sehingga dalam pelaksanaan harus dapat berjalan sesuai dengan ukuran dasar dan tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik dimasing – masing bidang.

### 2. Sumber Kebijakan

Selain ukuran dasar dan tujuan kebijakan, hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber – sumber kebijakan yang tersedia. Sumber yang dimaksud mencakup dana dan perangsang yang dalam mendorong dan mempelancar implementasi kebijakan sehingga dapat berjalan dengan baik. Dari data observasi yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian dapatkan dari Laporan Tahunan 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung, besaran komposisi dana yang diperuntukan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung guna *Program Corporate Social Responsibility* adalah Sebagai Berikut :

**Tabel 2:** Besaran Komposisi Laba Bersih yang diperuntukan guna Program *Corporate Social*

No	Tahun	Lab Bersih (dalam juta)	Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (dalam juta)	Presentase
1	2019	147.533	4.697	3,1 %

*Responsibility* Tahun 2020

Sumber : Annual Report 2019, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung dalam www. Banklampung.co.id diakses tanggal 05 Mei 2020

Dari data primer dan data sekunder yang didapat penulis selama melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa sumber kebijakan yang menunjang dalam implementasi program CSR pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Tahun 2020 berupa alokasi dana yang diperoleh dari keuntungan yang berasal dari laba bersih tahun 2019. Besaran laba bersih yang didapat PT Bank Pembangunan Daerah Lampung di tahun 2019 mencapai 147,533 Milyar dengan alokasi dana CSR yang terealisasi mencapai 4,697 milyar atau 3,1% dari laba bersih. dari beberapa data yang disajikan, dapat dipahami bahwa implementasi yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah memenuhi batas minimum Undang –Undang BUMN No 40 tahun 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang menetapkan batas minimum pengeluaran dana CSR sebesar 1%-2%. Maka PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sudah melebihi batas minimum, dengan mengeluarkan dana CSR mencapai 3,1% dari laba bersih untuk program CSR guna menunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kota Metro khususnya. Realisasi Program CSR yang diberikan kepada Pemerintah Kota Metro sebesar 184.483.000, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3 :** Realisasi Penyaluran Program *Corporate Social Responsibility* PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020

No	Program	Penerima	Jenis Pemberian	Besaran	Presentase
1	Peningkatan Mutu Pendidikan	TK Khodojah	Pengadaan Meublier	25.000.000	13.5%
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1. Kube E-Warung Bina Makmur	Pembangunan Ruangan	12.808.000	59,5%
		2. Kube E-Warung Drupradi	Pembangunan Ruangan dan Meublier	18.990.000	
		3. Kube E- Warung Sentosan	Pembangunan Ruangan dan Meublier	19.945.000	
		4. Kelompok Tani Mandiri Jasa Bersama	Pengadaan Mesin Pencacah Rumput dan Pengiling Kotoran	15.000.000	
		5. Wulandari Handmade	Pengadaan Mesin Jahit	20.740.000	
		6. Rumah Tapis Dewi Satika	Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras	22.000.000	
3	Peningkatan Pelastarian Lingkungan Hidup	Kelompok Bank Sampah	Pengadaan Bentor	27.000.000	14.5%
4	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengadaan Bangku Taman Sebanyak 8 Unit dan Pengadaann Tempat Sampah 4 Unit	23.000.000	12.5%
JUMLAH				184.483.000	100%

Sumber : PT Bank Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sumber dana yang telah direalisasikan PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Metro dalam Program Corporate Social Responsibility senilai Rp. 184.483.000 yang dibagi dalam 4 program besar. Dari data diatas terlihat bahwa dalam realisasi dana Program CSR paling banyak diberikan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dengan presentase mencapai 59,5% disusul dengan program Peningkatan Pelastarian Lingkungan Hidup sebanyak 14,5%, Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sebanyak 13,5% dan terakhir Peningkatan Pembangunan Insfrastuktur sebanyak 12,5% .

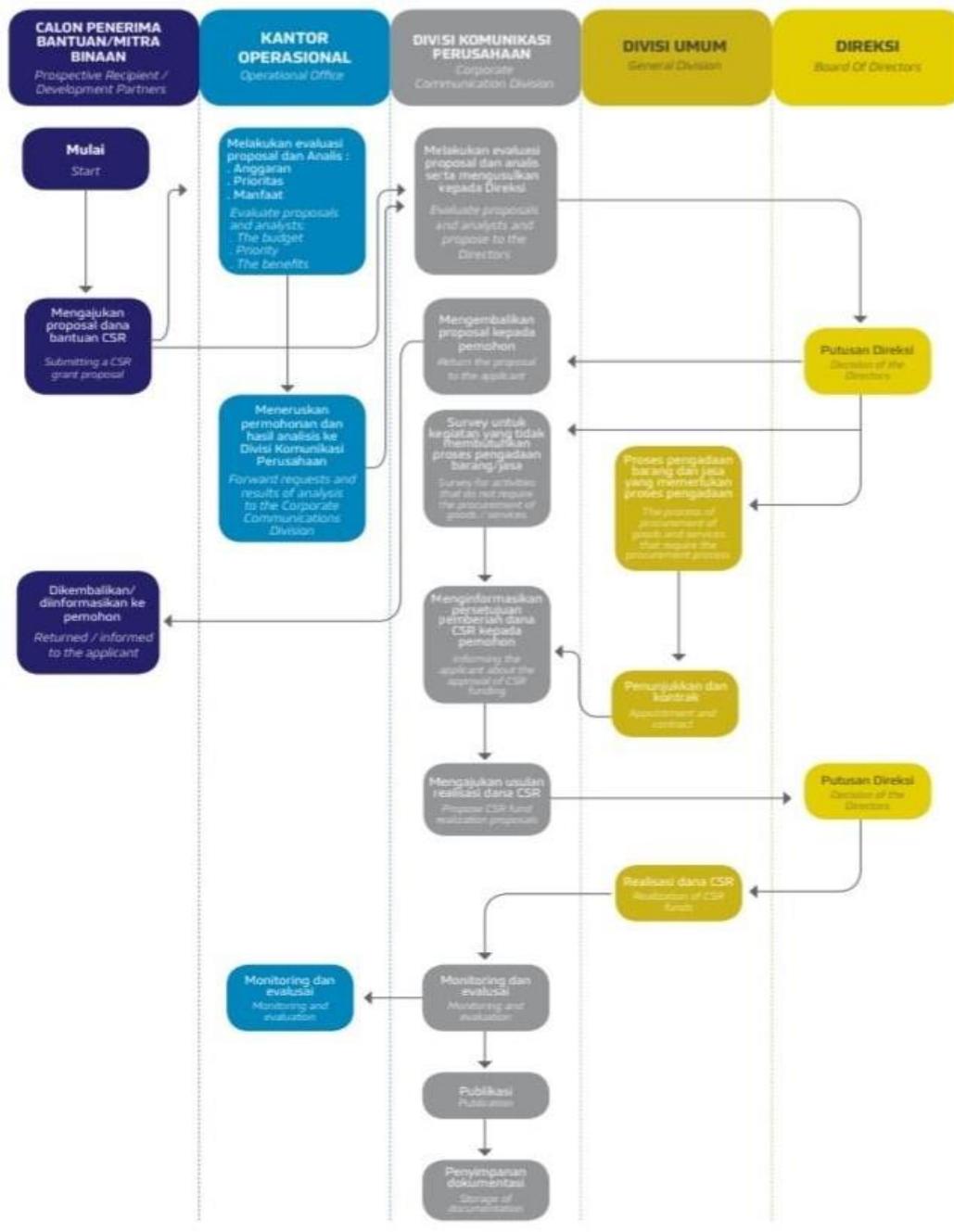
Tingginya presentase pemberian dana pada program peningkatan pemberdayaan masyarakat mencapai 59,5%, menunjukkan bahwa dalam PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro telah menimplementasikan Program CSR sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal ayat 2 Penggunaan Laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di prioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Pemberian bantuan berupa pengadaan ruangan, mubieler dan alat alat penunjang produksi merupakan langkah nyata yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Kantor cabang Metro mengaharapkan agar masyarakat di Metro dapat lebih berdaya dalam mengembangkan bisnisnya.

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Cabang Metro Sebagai bagian dari masyarakat, senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Lampung berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Tingginya sumber dana yang dialokasikan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro untuk program pemberdayaan masyarakat di Kota Metro memiliki tujuan agar masyakat metro dapat lebih berdaya untuk meningkatkan perekonomian usahanya.

Menurut Prijno dan Prannarka (Situmeang, 2016 : 88) pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Dengan pemberian bantuan berupa alat pencacah rumput, pengiling kotoran, mesin jahit, mesin obras serta pembangunan ruangan dan pengadaan mubiler untuk beberapa kelompok usaha bersama e-warung yang ada di Kota Metro hal ini menjadi memacu masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sehingga mereka dapat lebih berdaya guna.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi

Dalam berbagai implementasi kebijakan, Selain dimensi ukuran dasar, tujuan dan sumber kebijakan perlu dibagunnya hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Agar dalam pelaksanaanya program tersebut dapat berhasil berjalan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dalam hal apapun apalagi dalam penyampaian kebijakan yang akan diberlakukan. Dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) melewati beberapa tahap yang melibatkan banyak organisasi. hal ini tergambar dalam Alur Persetujuan dan penggunaan dana CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Gambar 2: Alur Persetujuan Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Edward (Winarno, 2012:178) menyebutkan tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakannya mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan kebijakan harus diteruskan kepada petugas yang tepat sebelum keputusan itu diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengeri dengan cermat oleh para pelaksana. Maka bila dari hasil wawancara komunikasi yang dibangun dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik.

#### 4. Karakteristik Badan Pelaksana

Seperti konsep yang telah diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam pembahasan dimensi karakteristik badan pelaksana maka tidak lepas dalam struktur organisasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan van Horn (Winarno, 2012:166) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan: 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana; 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi 4) Vitalitas suatu organisasi; 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama dilapangan terkait karakteristik badan pelaksana dalam implementasi program *corporate social responsibility* pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro memiliki struktur birokrasi yang telah terstruktur dengan baik, dan dari hasil observasi disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program CSR pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro telah memiliki karakteristik birokrasi yang terstruktur dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak, keterbukaan informasi dalam pelaksanaannya serta pelaksanaan berupa audit dari lembaga internal dan eksternal yang akan memonitoring pelaksanaan program ini.

#### 5. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Sikap pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi oleh sikap disiplin. Dalam dimensi penilaian sikap atau disposisi para pelaksana ada dua elemen yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Yaitu pemahaman dan respon dari agen pelaksana. Dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro sebagai leading sector dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* merupakan instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan program dituntut untuk lebih memahami kebijakan program agar dapat berjalan dengan berhasil. Berbagai hasil observasi dan wawancara dilapangan disimpulkan bahwa sikap pelaksana sangat memahami dan merespon pelaksanaan program *corporate social responsibility*.hal ini terlihat dari sikap para pelaksana yang sangat mendukung pelaksanaan program. Petugas sangat memahami tentang isi program. Keberhasilan program tersebut dapat diraih apabila kognisi para pelaksana yang baik dan dapat dukungan penuh serta persetujuan para stakeholder yang terlibat dalam hal ini para pelaksana program.

#### 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai keberhasilan dari implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik. Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2012:171) mengatakan bahwa sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Dari hasil observasi yang dilakukan penelitian lingkungan politik sangat tidak berpengaruh dalam implementasi ini. Karena hal – lah yang berbau politik tidak boleh dilibatkan ini dipertegas dalam keputusan direksi No: 153.KEP/DIR/KOM/X/2018 tentang Pengelolaan Dana

*Corporate Social Responsibility* pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung BAB IV (1) point (4) menyebutkan ketentuan dan kriteria penerima manfaat tidak boleh berafiliasi dengan partai politik.

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Program CSR, lingkungan politik tidak memiliki pengaruh dalam pelaksanaannya. Tidak seperti lingkungan ekonomi dan sosial. Dalam pelaksanaan program CSR pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro dalam implementasinya lingkungan politik tidak memiliki banyak pengaruh. Pengaruh paling kuat berasal dari lingkungan sosial yaitu masyarakat dan faktor ekonomi sehingga banyak dari masyarakat yang antusias dalam mengajukan proposal. Bahwasanya suatu kebijakan bisa jadi tidak akan berjalan dengan baik jikalau didukung tidak didukung oleh lingkungan yang baik. Dalam hal ini bisa dipastikan pelaksanaan program CSR bisa berjalan dengan baik karena didukung oleh lingkungan sosial dan ekonomi.

## KESIMPULAN

Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro dapat disimpulkan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari : (1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan, ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang menjadi standar pelaksanaan program dituangkan sangat jelas dalam Surat Keputusan Direksi No : 153.Kep/Dir/Kom/X/2018 tentang Pengelolaan Dana Pertanggung Jawaban Sosial dan Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung; (2) Sumber Kebijakan, sumber kebijakan utama dalam program ini ada sumber anggaran. dalam pelaksanaannya sumber anggaran Program ini berasal dari laba bersih yang disisihkan. Untuk pelaksanaan di tahun 2020 anggaran yang di realisasikan untuk program ini sudah melewati batas minimum pemberian dari CSR yang diatur dalam perundang – undangan dengan persentasi yang direalisasikan sebesar 3,1% dari laba bersih; (3) Komunikasi antar organisasi, dalam implementasi program ini sudah berjalan dengan dengan baik.komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan secara jelas dan konsisten. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dijumpai miskomunikasi; (4) Karakteristik badan pelaksana, dalam implementasi program CSR pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Metro telah memiliki karakteristik badan pelaksana yang terstruktur dengan baik. Dimana birokrasinya jelas, pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawabnya jelas serta didukung dari berbagai pihak, keterbukaan informasi dalam pelaksanaannya serta pelaksanaan berupa audit dari lembaga internal dan eksternal yang akan memonitoring pelaksanaan program ini; (5) Sikap atau kecendrungan(disposisi) para pelaksana, sikap pelaksana sangat memahami dan merespon dengan baik pelaksanaan program *corporate social responsibility*.(6)Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, lingkungan politik tidak begitu berpengaruh dalam implementasi program ini, dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi yang memiliki dapat besar sehingga program ini dapat berhasil berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewi, M. P. (2017). The Problem of Basic Education Policy and Its Implementation in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 43(Icas), 138–141.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik,diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Miles, M.B. & Huberman, A. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakart : Buku Beta.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung

Randy R. Wrihatnolo, (2007) : Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Elex Komputindo.

Situmeang (2016), Corporate Sosial Responsibility Dipandang Dari Perspektif Komunikasi Organisasi. Yogyakarta: Ekuilibria.

Usman, Nurdin (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta,

Waspa Kusuma Budi, Birokrasi, Kepemimpinan, dan Layanan publik, Lampung: Pancar press, 2010.

**Sumber Lain :**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Surat Keputusan Direksi Bank Lampung, Surat Keputusan Direksi Nomor : 153.Kep/Dir/Kom/X/2018 tentang Pengelolaan Dana Pertanggung Jawaban Sosial dan Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Annual Report PT. Bank Lampung Tahun 2019, dalam <http://banklampung.co.id/download/AnnualReportBankLampung2019.pdf> diunduh pada 09 Mei 2020